

Politik Pendidikan Islam: Studi Kebijakan Publik Belanda pada masa Penjajahan di Indonesia

Bagas Mukti Nasrowi

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: bagas.muktinasrowi@uingusdur.ac.id

Abstract

Of the many things left by the Dutch in Indonesia, one of the important things to study is the change in the Islamic education system in Indonesia. In fulfilling its ambition to control the archipelago, the Dutch government implemented several policies. especially those related to Islamic education including; Ethical politics, association politics and teacher ordinances and wild school ordinances. And Islamic education at that time was a victim created by the results of policies issued by the Dutch. to discuss Dutch public policies that were implemented during the colonial period in Indonesia by way of literature study through literature recorded in the history of education in Indonesia.

Keywords: Politics, Islamic Education, Dutch Public Policy

Pendahuluan

Studi tentang politik pendidikan Islam memiliki makna yang sangat penting, terutama dalam menatap sistem pendidikan Islam di Indonesia dengan tata laksana yang lebih baik (*good government*). Dan masa penjajahan Belanda dapat dikatakan sebagai suatu pondasi berbagai sistem di Indonesia. Mulai dari sistem birokrasi, pemerintahan, perekonomian, dan pendidikan. Dari sekian banyak ditingalkan Belanda di Indonesia salah satu hal yang penting untuk di kaji adalah perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pendidikan adalah salah satu point penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Secara umum masa penjajahan Belanda terbagi menjadi beberapa periode *Periode awal*, Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia dan lalu mendirikan VOC. *Periode kedua*, masa pemerintahan Hindia Belanda yang menggantikan VOC yang tumbang karena kebangkrutan. *Periode ketiga*, masa pemerintahan Inggris yang berlangsung sangat singkat tetapi berandil besar dalam kemunduran pendidikan di Indonesia. *Periode keempat*, kembalinya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia sampai akhirnya ditaklukan oleh Jepang. Dalam empat periode ini yang mencapai 3,5 abad lamanya tentu dalam pendidikan Islam dan kolonialisme Belanda sangat pekat dengan konstelasi politik di dalamnya.

Untuk menguraikan konstelasi politik pendidikan Islam yang terjadi pada masa kolonialisme Belanda, dalam paper ini akan diulas tiga pembahasan besar, yaitu: **pertama**, membahas tentang kondisi pendidikan Islam sebelum masa penjajahan Belanda, pembahasan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran pendidikan Islam sebelum dikomparasikan dengan pendidikan masa Belanda. **kedua**, mengulas tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda, pembahasan ini dimaksudkan untuk mencari kebijakan-kebijakan Belanda yang bersifat politis. Dan **ketiga**, akan dibahas Politik pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda, dalam membahas politik pendidikan Islam ini dengan menggunakan pendekatan kebijakan public.

Pembahasan

1. Pendidikan Islam Sebelum Penjajahan Belanda

Pada abad ke 7 Masehi, agama Islam mulai masuk ke wilayah kepulauan nusantara. Masuknya Islam ke wilayah nusantara ini, dibawa oleh para saudagar dari Arab yang terlebih dahulu singgah di Gujarat.¹ Para saudagar ini dalam setiap kesempatan selalu menyiarkan agama Islam kepada penduduk Indonesia yang dijumpai. Demi kepentingan syiar atau pengajaran Islam, para saudagar ini giat melaksanakan pendidikan.

Proses pengajaran yang dilaksanakan oleh para saudagar Arab ini, bentuknya sangat sederhana, seperti dalam konteks jual beli, perkawinan, dan dakwah langsung, baik secara individual maupun kolektif. Adapun materi pelajaran pertama yang diajarkan adalah tentang pengucapan dua kalimat syahadat. Setelah itu, baru diperkenalkan cara-cara melaksanakan shalat lima waktu, diajarkan cara membaca al-Qur'an dan seterusnya.²

Bersamaan dengan jumlah penganut agama Islam yang semakin banyak, maka tuntutan pendidikanpun semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Maka dalam perkembangan berikutnya pendidikan Islam berkembang menjadi semakin sistematis, dengan adanya tempat khusus yang digunakan untuk proses pengajaran, ada seorang guru yang khusus menyediakan diri sebagai pendidik, serta ada materi pembelajaran yang jelas. Adapun dengan penyelenggaraan pendidikan yang semakin sistematis tersebut adalah proses pendidikan yang diselenggarakan di langgar dan pesantren.

Pendidikan di langgar dilaksanakan di kampung-kampung. Hal ini terjadi karena setelah Islam berkembang pesat di Indonesia, di setiap desa dibangun masjid untuk melaksanakan salat Jumat yang merupakan ibadah mingguan dan

¹Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: BinaAksara, 1986), 5.

²Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 20-21.

juga salat lima waktu. Sedangkan untuk tingkat kampung, dibangun surau, musholla atau langgar. Selain dimaksudkan sebagai tempat melaksanakan salat secara berjamaah, masjid dan langgar juga dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan, terutama bagi anak-anak.

Sistem pendidikan langgar ini, merupakan pendidikan dasar dan diselenggarakan dengan sederhana. Awalnya diajarkan anak-anak tentang huruf *hija'iyah*. Setelah itu, anak diperkenalkan dengan surat-surat pendek juz *Amma*. Baru setelah itu diajarkan al-Qur'an secara keseluruhan dengan cara bertahap. Jadi, pada pendidikan tingkat ini, difokuskan pada penguasaan membaca al-Qur'an. Dan disebut pendidikan al-Qur'an.³

Selain pelajaran yang berkenaan dengan bacaan al-Qur'an, dalam pendidikan di langgar khususnya kepada para siswa yang sudah senior atau sudah mahir membaca al-Qur'an juga diajarkan mata pelajaran lain. Meliputi: membaca al-Qur'an, ibadah (berwudlu, shalat, dan sebagainya), keimanan (aqidah), dan akhlak.⁴

Setelah anak di anggap lulus atau menamatkan pendidikan di langgar atau masjid, bagi mereka yang ingin memperdalam serta memperluas pengetahuan, khususnya ilmu agama, maka mereka pergi ke pesantren. Sistem pendidikan yang diselenggarakan di pesantren, berbeda dengan yang ada dilanggar. Secara garis besar, setidaknya ada tiga perbedaan yang menonjol;

- a. Para murid yang belajar di pesantren, pada umumnya tinggal di asrama dalam lingkungan pesantren tersebut.
- b. Mata pelajaran yang diberikan, meliputi mata pelajaran yang lebih banyak dari pada pendidikan dilanggar.
- c. Di pesantren, pendidikan diberikan tidak hanya secara individual, tapi juga secara berkelompok.⁵

Pesantren mulai dikenal di bumi nusantara pada abad ke 13-17 M,⁶ yaitu ditandai dengan prakarsa Sultan Alaudin Muhammad Amin (1243-1267M), salah seorang raja Perlak, yang mendirikan perguruan tinggi Islam di wilayah kekuasaannya. Sedang di Jawa pada 1474, Raden Fatah mendirikan pesantren di hutan Glagah Arum, sebelah Selatan Jepara.⁷

Selain berperan sebagai panutan dan rujukan moral masyarakat, pada masa penjajahan berlangsung, pesantren juga menjadi basis pembinaan bagi kaum muslimin dalam menghadapi perilaku kaum imperialis tersebut. Sepertinya, hal itu pulalah yang menjadikan pesantren di era penjajahan banyak yang

³Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, (Jakarta: LP3ES, 1986), 10.

⁴Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), 35.

⁵Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, 12.

⁶Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), 20.

⁷Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, 217.

mengambil lokasi pendirian di daerah pinggiran.

Nampaknya, dari peran-peran sosial pesantren yang begitu menonjol itulah akhirnya pada masa-masa berikutnya kaum imprialis senantiasa mengambil arah berlawanan dengan pesantren, terutama tatkala Belanda hendak mendirikan lembaga pendidikan bagi kaum pribumi.

2. Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Pada mulanya kedatangan orang-orang asing bangsa Belanda ke Indonesia adalah untuk menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa Indonesia, sambil berdagang Belanda berupaya menancapkan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Lambat laun bangsa Belanda berhasil memperkuat dirinya di Nusantara, dan mendirikan sekolah dengan tujuan agar dapat menguasai Indonesia dengan mudah.⁸ Dulu di wilayah yang sekarang negara Indonesia ini, Snouck Hurgronje menyebutnya dengan istilah wilayah *Jawah* yang meliputi wilayah antara Siam, Malaka dan New Guinea.⁹

Ketika Belanda datang, pendidikan Islam mulai mengalami hambatan dan tantangan untuk berkembang lebih maju, terutama untuk menghadapi kristenisasi yang dilakukan kaum penjajah dari bangsa Portugis maupun Belanda.¹⁰

Setelah bangsa Belanda mengenal Indonesia sekitar 1595M, dan pada tahun-tahun kemudian mampu menghalau bangsa Portugis dari tanah Maluku, maka Belanda dengan VOC nya melanjutkan dan menyelenggarakan pendidikan seperti yang telah dilakukan oleh Portugis. Kalau bangsa Portugis menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menyebarkan agama Kristen Katholik, maka bagi bangsa Belanda adalah untuk melenyapkan agama Katholik dan menggantinya dengan agama Kristen Protestan.¹¹

Dengan latar belakang seperti itu, akhirnya penyelenggaraan pendidikan oleh VOC hanya difokuskan di daerah Maluku yang memang telah banyak terpengaruh agama Katholik. Adapun di daerah lain, hanya di Batavia pada 1617 M. Karena daerah ini sebagai pusat administrasi kolonial. Sedangkan daerah-daerah lain yang masih mayoritas muslim, dibiarkan meneruskan dan menyelenggarakan pendidikan sendiri. Dengan demikian, pada masa itu belum ada pendidikan model Barat yang diorientasikan untuk mencerdaskan penduduk pribumi. Dan pendidikan Barat seperti yang ada di Batavia pada waktu itu jumlahnya masih sedikit, serta diperuntukkan bagi golongan anak orang Belanda dan anak bangsawan pribumi.

Jadi, masyarakat umum pada waktu itu belum bisa mengenyam pendidikan

⁸Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 150.

⁹Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of the 19th Century*, (Boston: Brill, 2007), 229.

¹⁰Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), 14.

¹¹Karel A. Steenbrink, *Kawan dalam Pertikaian, Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia*, Penj. Suryan A. Jamrah (Bandung: Mizan, 1995), 17.

model Barat. Pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan pada masyarakat umum, baru muncul pada abad ke-18 M, setelah aliran Aufklarung bergaung di daratan Eropa. Sedang realisasi dari pemikiran tersebut di Indonesia baru muncul pada 1848. Dalam keputusan itu, raja memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal (pada waktu itu Van den Bosch) untuk menyediakan biaya f.25.000 setahun bagi pendirian sekolah-sekolah bumi putra di pulau Jawa.¹²

Setelah terbitnya keputusan raja tersebut, akhirnya sekolah-sekolah untuk anak-anak pribumi mulai dibuka. Namun, sebelum program itu benar-benar terwujud, terjadi perdebatan yang mempersoalkan tentang bentuk dari lembaga pendidikan yang hendak diselenggarakan. Ada beberapa usulan yang berbentuk proposal yang mengharapkan adanya penggabungan antara pendidikan yang akan dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda dengan pendidikan Islam yang telah ada (pesantren).¹³ Adapula yang mengusulkan agar lembaga pendidikan Islam yang telah ada (pesantren), di manfaatkan untuk mengembangkan sistem pendidikan umum.¹⁴

Namun, semua usulan di atas ditolak. Tokoh pertama di kalangan pegawai pemerintah kolonial Belanda yang secara penuh bekerja untuk pendidikan orang bukan Eropa, J.A. Vander Chijs, pada 1865, secara tegas menolak ide-ide di atas. Alasan yang dia kemukakan adalah alasan teknis. Dia mengatakan bahwa kebiasaan belajar mengajar yang ada di pesantren, terlalu jelek, sehingga tidak bisa dipakai dalam sekolah pribumi.¹⁵

Selain dari itu umat Islam dan pendidikannya serta segala yang berkaitan dengan masyarakat dan keagamaan mulai ditekan. Kemudian Belanda mulai menerapkan langkah-langkah untuk membatasi gerak pengamalan agama Islam. Upacara-upacara keagamaan yang dilakukan secara terbuka mulai dilarang. Pembatasan dan pengawasan ketat oleh pemerintah Belanda terhadap umat Islam, mengakibatkan pengajaran nilai-nilai Islam dan peningkatan keberlakuan nilai-nilai Islam menjadi tersendat-sendat.¹⁶

3. Politik Kebijakan Publik Belanda pada Pendidikan Islam

a. Politik Etis

Politik Etis diberlakukan tahun 1901, istilah ini biasa disebut dengan politik balas budi, sehingga adanya kebijakan politik Belanda kepada Indonesia sebagai jajahannya, dengan kata lain politik ini adalah sistem yang diberlakukan Belanda untuk membangun negara jajahannya. Cikal bakal politik Etis berdasarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Ratu

¹²Ibid., 13.

¹³Steenbrink, Kawan.,117

¹⁴Steenbrink, Pesantren.,3.

¹⁵Ibid.,7

¹⁶Hanun, *Sejarah*, 151.

Belanda Wilhelmina menjelang akhir tahun 1901, diantara pokok-pokok pikirannya; *de nieuwe koers de koloniale politiek* (arah baru yang akan ditempuh oleh politik penjajahan).¹⁷

Secara konsep politik Etis sangat baik karena adanya keberpihakan kepada kaum pribumi. Namun dalam pelaksanaannya kolonial Belanda bekerjasama dengan kaum liberal (pemegang saham), tetap mengeksplotir daerah jajahannya untuk kepentingan ekonominya. Dalam menjalankan politik Etis Belanda menerapkan *trilogy program*, yaitu meliputi: *edukasi* (pendidikan), *irigasi* (pengairan) dan *transmigrasi* (pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah perkebunan jawa). Disamping trilogi program tersebut, penjajah Belanda menerapkan prinsip *assosiasi*, *asimilasi*, dan *unifikasi*.¹⁸

Tetapi betapapun kekhawatiran yang timbul, agaknya kepentingan dan pertimbangan politik lebih mereka utamakan. karena itu pelaksanaan politik Etis secara murni, sedikit banyaknya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut kelanjutan politik kolonialis mereka. diantara pertimbangan itu adalah *pertama*, memilih sistem pendidikan yang dapat memenuhi tuntunan moral politik Etis, tapi juga dapat mendukung kepentingan politik penjajahnya. *kedua*, berusaha memenuhi bertanggung jawab untuk mendidik dan mencerdaskan rakyat yang mayoritas muslim dan disamping itu juga berusaha meredam kekuatan yang mungkin timbul dari pengaruh fanatisme keagamaan mereka.

Akhirnya pemerintah kolonial Belanda benar-benar menempuh jalan lain dalam menyelenggarakan kebijaksanaan pendidikan di Indonesia. Sekolah yang dibangun dan disubsidi pemerintah adalah sekolah-sekolah yang bermodel Barat. Pada 1882, pemerintah kolonial telah membangun sebanyak 512 sekolah di seluruh wilayah Hindia Belanda. Sekolah tersebut menekankan pada perbedaan strata sosial. Ada Sekolah Dasar Kelas Satu (*De Eerste Klasse Scholl*) yang di peruntukkan untuk anak para pemuka, tokoh terkemuka dan anak bangsawan. Berikutnya Sekolah Dasar Kelas Dua (*De Tweede Klasse School*) yang diperuntukkan bagi anak bumi putra pada umumnya atau rakyat kebanyakan. Sekolah ini hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan rakyat biasa.¹⁹

Namun, dalam realitasnya Sekolah Kelas Dua ini tidak berjalan sebagaimana yang digariskan. Hal ini dikarenakan Sekolah Kelas Dua merupakan lembaga pendidikan yang mahal atau membutuhkan biaya yang besar untuk dilaksanakan, dikarenakan jumlah penduduk bumi putra yang

¹⁷Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011). 272.

¹⁸Ibid.

¹⁹Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan.*, 14.

relatif banyak bila dibanding dengan kalangan bangsawan, sehingga membutuhkan sekolah dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menganggap sebagai pemborosan anggaran negara bila itu dilaksanakan. Sehingga pada kenyataannya, anak-anak bumi putra pada umumnya tidak mendapatkan pendidikan yang memadai seperti halnya yang menjadi tuntutan politik etis. Mereka tetap menggantungkan pemenuhan akan kebutuhan pendidikan terhadap lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri, yang mayoritas dilaksanakan oleh umat Islam dalam bentuk pesantren.

Berawal dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda ini, dualisme pendidikan telah terjadi di Indonesia. Satu sisi sekolah model Barat yang diselenggarakan dan disubsidi oleh pemerintah kolonial Belanda, di sisi lain pesantren yang pada perkembangan berikutnya memodifikasi diri dalam bentuk madrasah yang di kelola umat Islam. Dengan demikian, selain alasan global seperti disinggung diawal tulisan, dalam konteks Indonesia, dualisme pendidikan di Indonesia memiliki penyebab yang lebih spesifik, yakni pelaksanaan politik etis pemerintah Hindia Belanda yang tidak mau memanfaatkan pendidikan yang telah berkembang di masyarakat (pesantren) sebagai sekolah resmi yang diakui negara. Dan alasan yang mendasari, dengan mudah disimpulkan, yakni alasan politis agar umat Islam tidak menjadi umat yang terdidik dan berpengetahuan. Karena bila itu terjadi, mereka akan semakin sadar akan kondisi bangsanya yang terjajah dan kuat dalam melakukan perlawanan.

Hal lainnya adalah dengan adanya dua sistem pendidikan, pendidikan Barat dan pesantren bangsa Indonesia, khususnya umat Islam akan terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok kaum bangsawan dan priyayi yang berpendidikan Barat dan kelompok lainnya adalah mereka yang berpendidikan pesantren. Hal ini tentunya akan semakin menggerogoti persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia, dan kebijakan ini lebih dikenal dengan *divide et Impera*.

Politik etis merupakan gaya eksploitasi modern yang lebih canggih. Dengan kedok demi kesejahteraan pribumi, Belanda telah berupaya mematikan potensi masyarakat Indonesia terutama umat Islam. Kalau periode-periode sebelumnya bentuk penjajahan masih dominan berupa penjajahan fisik, namun pada periode politik etis ini sudah dilengkapi dengan penjajahan budaya. Bila dianalisa, justru penjajahan pola yang kedua ini yang masih membekas dan mewarnai segala aspek kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya dualisme pendidikan. Dengan demikian, politik etis pada kenyataannya bukan politik balas budi dalam arti yang sesungguhnya. Akan

tetapi hanya sebuah slogan kosong yang hanya ada dalam teori dan tidak ada itikat baik dalam pelaksanaannya. Belanda menjalankan politik etis karena takut kritik dunia internasional dan takut kalau politik kolonial membiarkan penderitaan pribumi berlanjut, maka akan mendorong timbulnya perlawanan rakyat. Jadi, dengan politik ini, rakyat Indonesia hendak dininabobokkan.²⁰

b. Politik Asosiasi

Kebijakan ini tidak lepas dari masukan Snouck Hurgronje, penasehat pemerintah Belanda yang secara mendalam mempelajari Islam. Hurgronje mengatakan, untuk melepaskan atau menjauhkan umat Islam dari agamanya, pendidikan adalah jalur yang sangat efektif. Dia mengatakan Pengasuhan dan pendidikan adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan di negeri-negeri berbudaya Islam yang jauh lebih tua dibanding kepulauan nusantara, mereka bekerja dengan efektif untuk membebaskan umat Muhammad dari kebiasaan lama yang telah lama membelenggunya.

Strategi ini Hurgronje ini terkenal dengan istilah asosiasi. Yakni, membuat orang bumiputra, khususnya para bangsawan dan tokoh masyarakat menjadi belanda. Mereka bisa berperilaku, bertindak, berbudaya, serta beragama layaknya orang Belanda. Sehingga bisa dikatakan asosiasi ini adalah pem-Belanda-an atau dalam arti luas westernisasi. Asosiasi diyakini akan mampu menghilangkan cita-cita pan Islam,²¹ dari segala kekuatannya. Secara tidak langsung, asosiasi juga akan bermanfaat bagi penyebaran agama Kristen, sebab penduduk pribumi yang telah berasosiasi akan lebih mudah menerima panggilan misi.²²

Hal ini dibuktikan dengan sekolah bumi putera yang ada menggunakan kurikulum wajib membaca, menulis, dan berhitung dan bahasa Belanda selain itu Bahasa Belanda diupayakan menjadi bahasa pengantar pendidikan. Tidak hanya dalam Bahasa saja, bahkan ketika Van Den Bosch menjadi gubernur jendral di Jakarta pada tahun 1983 dengan mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Sedangkan departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu dengan sebutan *Van Inlandsch en Arabische Zaken*, dan di setiap daerah karisidenan didirikan satu sekolah agama Kristen.²³

Proses westernisasi ini, menurut Hurgronje, paling efektif bila ditempuh melalui jalur pendidikan. Bila hal itu berhasil, Hurgronje yakin orang bumi putra, terutama para elitnya memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan Belanda, sehingga mereka tidak akan memiliki keinginan

²⁰G. Moerjanto, *Indonesia Abad Ke-20*, Jilid I, (Kanisius, Yogyakarta, 1998), 22.

²¹Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1992), 51-57.

²²Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 40.

²³Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Islam Era Rasulullah sampai Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 307

melepaskan diri untuk merdeka dari Belanda. Para pemuka bumi putra diyakini akan memiliki loyalitas kepada pemerintah pusat di Den Haag.²⁴ Hal ini sangat penting untuk menjaga kekuasaan Belanda di Indonesia.

c. Ordonasi Guru

Suatu Kebijakan pemerintah kolonial yang oleh umat Islam dirasakan sangat menekan adalah Ordonansi Guru. Ordonansi pertama yang dikeluarkan pada tahun 1905 mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Sedangkan ordonansi kedua yang dikeluarkan pada tahun 1925, hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur Islam di negeri ini.

Sesudah terjadinya peristiwa Cilegon tahun 188, K.F. Holle pada tahun 1890 menyarankan agar pendidikan agama Islam diawasi, karena pemberontakan para petani di Banten itu dinilai dimotori oleh para haji dan guru agama. Maka di Jawa terjadilah pemburuan terhadap guru agama; dan demi penyeragaman dalam pengawasannya, maka K.F. Holle menyarankan agar bupati melaporkan daftar guru di daerahnya setiap tahun. Kemudian pada tahun 1904 Snouck Hurgronje mengusulkan agar pengawasan tersebut meliputi adanya izin khusus dari bupati, daftar tentang guru dan murid, serta pengawasan oleh bupati harus dilakukan oleh suatu panitia. Pada tahun 1905 lahirlah suatu peraturan tentang pendidikan agama Islam yang disebut dengan Ordonansi Guru, dan dinyatakan berlaku untuk Jawa madura kecuali Yogya dan Solo, yang isinya:

- 1) Seorang guru agama Islam boleh mengajar bila sudah memperoleh izin dari bupati.
- 2) Izin tersebut baru diberikan bila guru agama tersebut jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik, dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan ketertiban umum.
- 3) Guru agama Islam tersebut harus mengisi daftar murid, di samping harus menjelaskan mata pelajaran yang diajarkan.
- 4) Bupati atau instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-waktu.
- 5) Guru agama Islam bisa dihukum kurung maksimum delapan hari atau denda maksimum dua puluh lima rupiah, bila ternyata mengajar tanpa izin atau lalai mengisi dan mengirimkan daftar tersebut; atau enggan

²⁴Suminto, *Politik Islam.*, 39.

memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau diperiksa oleh yang berwenang.²⁵

Bagi suatu sekolah yang memiliki organisasi teratur, tuntutan ordonansi ini memang tidak menjadi masalah. Tapi bagi guru-guru agama pada umumnya yang tidak memiliki administrasi memadai dalam mengelola pengajiannya, peraturan ini terasa memberatkan. Apalagi pada waktu itu lembaga pendidikan pesantren belum memiliki administrasi yang teratur, daftar murid dan guru, atau mata pelajaran. Banyak di antara guru agama waktu itu yang tidak bisa membaca huruf latin, sedangkan yang bisa membacapun belum tentu mempunyai mesin tulis untuk mengisi sekian lembar daftar laporan.

Ordonansi Guru tahun 1905 yang mewajibkan guru-guru agama Islam untuk minta izin itu, kemudian dinilai kurang efisien, karena laporan tentang guru agama dan aktifitasnya yang secara periodik disampaikan bupati ternyata kurang meyakinkan, di samping situasi politik waktu itu dinilai sudah tidak lagi memerlukan “pemburuan” guru agama. Karena itu pada tahun 1925 dikeluarkanlah Ordonansi Guru baru yang hanya mewajibkan guru agama untuk memberitahu, bukan meminta izin. Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk Jawa saja. Sejak 1 Januari 1927 berlaku pula untuk Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado, dan Lombok. Kemudian pada tahun tiga puluhan berlaku pula untuk Bengkulu.

Reaksi terhadap Ordonansi Guru agaknya bukan hanya dilancarkan oleh pihak pribumi, tapi juga oleh pihak Belanda sendiri. Sebagaimana diuraikan di atas, tujuan ordonansi ini adalah untuk mengawasi atau mengontrol pendidikan agama Islam; dan untuk itu adanya daftar guru dan segala aktifitasnya sangat diperlukan. Dalam hal ini van der Plas pada tahun 1934 berpendapat, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut daftar guru yang dipaksakan itu sama sekali tidak ada gunanya. Dia pun melihat akibat sampingan ordonansi ini dan memandangnya sebagai rintangan paling besar bagi karya produktif di Hindia Belanda. Dia berpendapat bahwa demi penyederhanaan dan efisiensi, hendaknya pemerintah kolonial menghapuskan Ordonansi Guru yang dinilai hanya akan menghabiskan kertas ini.

Menanggapi pelbagai keinginan dihapuskannya Ordonansi Guru ini, Snouck Hurgronje dalam suratnya kepada Menteri Jajahan tahun 1935 masih berpendapat perlunya dipertahankannya ordonansi tersebut, meskipun dengan beberapa usul perubahan. Namun betapapun situasi kondisi telah jauh berubah. Di pihak pemerintahan kolonial sendiri, situasi ekonomi moneter menuntut diadakannya penghematan dan penyederhanaan. Di pihak

²⁵Suminto, *Politik Islam.*, 53

pribumi, kekhawatiran akan timbulnya pemberontakan seperti terjadi di Cilegon tahun 1888, sudah tidak perlu ada. Bahaya gerakan tarekat maupun Pan Islam juga tidak perlu dikhawatirkan lagi, sehingga guru agama Islam tidak lagi harus diburu. Itulah sebabnya mengapa nasehat arsitek Ordonansi guru 1905 ini, tidak seampuh masa-masa yang lalu. Ordonansi Guru 1905 kehilangan urgensinya dan betapapun terpaksa menghilang dari peredaran.²⁶

d. Ordonasi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*)

Sejak tahun 1880 pemerintah kolonial secara resmi memberikan izin untuk mendidik pribumi. Kebebasan mendidik pribumi ini kemudian dihapuskan oleh adanya Ordonansi Pengawasan tahun 1923. Sejak itu setiap orang yang hendak mendirikan suatu lembaga pendidikan, harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada kepala daerah setempat, dengan menyebutkan cara pengajaran dan tempat mengajarnya.

Pengawasan melalui Ordonansi 1923 ini hanya bersifat wajib lapor bagi penyelenggara suatu lembaga pendidikan, sementara kalangan luas pejabat kolonial menghendaki pengawasan lebih ketat. Pada tanggal 17 Oktober 1929, Schrieke selaku direktur Pendidikan diperintahkan oleh Sekretaris Negara atas saran Dewan Penasehat Hindia, untuk meninjau kemungkinan ditindaknya sekolah liar. Tetapi Schrieke, yang pada dasarnya menyetujui pendapat pendahulunya Hardeman bahwa pemerintah belum perlu mengambil tindakan terhadap sekolah liar agaknya berhasil menunda masalah ini sampai tahun 1932; yakni keluarnya *Toezicht-ordonantie particulier Onderwijs* tanggal 17 September 1932 yang dinyatakan berlaku mulai 1 Oktober 1932, yang berisi;

- 1) Sebelum memperoleh izin tertulis dari pemerintah, suatu lembaga pendidikan yang tidak sepenuhnya dibiayai oleh dana pemerintah tidak dibenarkan memulai aktivitasnya.
- 2) Hanya lulusan sekolah pemerintah atau sekolah swasta bersubsidi yang dinilai baik oleh pemerintah, berhak mengajar di sekolah ini.
- 3) Ordonansi ini tidak berlaku bagi lembaga pendidikan agama.

Taman siswa yang seluruh sekolahnya terkena ketentuan ordonansi ini bertekad untuk mengadakan perlawanan pasif. Tekad tersebut dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam kawatnya ke Gubernur Jenderal, juga dalam pembicaraan lisan dengan Kiewiet de Jonge selaku kuasa pemerintah ketika berkunjung ke rumahnya. Sarekat Islam (SI) yang sejak tahun 1932 telah menjelma menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), juga mengumumkan suatu manifesto menentang ordonansi ini.

Pada tahun tahun 1932 sering terjadi konferensi atau rapat umum yang berakhir dengan keputusan menolak Ordonansi Sekolah Liar.

²⁶Suminto, *Politik Islam.*, 58.

Konferensi dewan pendidikan Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) di Sumatera Barat tanggal 26-27 Desember 1932 memutuskan bahwa ordonansi ini melanggar dasar-dasar Islam dan dasar-dasar umum, di samping mengurangi kebebasan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun pendidikannya sendiri. Para ulama besar Minangkabau, yang beranggapan ordonansi ini merupakan percobaan untuk membunuh sekolah-sekolah Islam, menuduh pemerintah kolonial bertindak menguntungkan Kristen. Mereka memutuskan akan berjuang hidup atau mati untuk Islam.

Dengan demikian jelas terlihat, pendidikan agama Islam yang ada di pondok pesantren, masjid dan mushalla atau yang lainnya dianggap tidak membantu pemerintahan Belanda. Politik yang dijalankan pemerintahan Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya didasari oleh rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialisme sehingga dengan begitu mereka menerapkan peraturan dan kebijakan dengan memanfaatkan kekuasaannya.²⁷

Kesimpulan

Dari uraian paper dengan tema politik pendidikan Islam dalam masa pemerintahan kolonialisme Belanda, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada awalnya proses pendidikan Islam di Nusantara dimulai oleh para saudagar dari Arab Demi kepentingan syiar atau pengajaran Islam, para saudagar ini giat melaksanakan pendidikan, dengan metode jual beli, perkawinan, dan dakwah langsung, baik secara individual maupun kolektif yang bertempat di langgar dan masjid. Dan seiring pesatnya minat pendidikan Islam dalam perkembangannya terciptalah pesantren sebagai tempat pendidikan yang sistematis.
2. Pada mulanya kedatangan orang-orang asing bangsa Belanda ke Indonesia adalah untuk menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa Indonesia, sambil berdagang Belanda berupaya menancapkan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Lambat laun bangsa Belanda berhasil memperkuat dirinya di Nusantara, dan mendirikan sekolah dengan tujuan agar dapat menguasai Indonesia dengan mudah dan bersamaan dengan itu pendidikan Islam mulai mengalami hambatan dan tantangan untuk berkembang lebih maju seiring perkembangan zaman terutama menghadapi kolonialisme Belanda.
3. Dalam memenuhi ambisinya dalam menguasai nusantara, pemerintahan Belanda menerapkan beberapa kebijakan khususnya yang berhubungan dengan pendidikan Islam diantaranya; politik Etis, politik asosiasi dan ordonasi guru dan ordonasi sekolah liar. Dan pendidikan islam pada saat itu merupakan korban yang tercipta dari hasil kebijakan yang dikeluarkan Belanda.

²⁷ Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, 307.

Daftar Pustaka

- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.1999.
- Gunawan, Ary H. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: BinaAksara. 1986.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS. 1994.
- Moerjanto, G. *Indonesia Abad Ke-20, JilidI*. Kanisius: Yogyakarta. 1998.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nata, Abuddin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Islam Era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia,2011.
- Steenbrink, Karel A. *Kawan dalam Pertikaian, Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia*, Penj. Suryan A. Jamrah. Bandung: Mizan.1995.
- _____.*Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES.1986.
- Hurgronje, Snouck. *Mekka in the Latter Part of the 19th Century*. Boston: Brill, 2007.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES,1985.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung. 1992.